

Judul : Industri pupuk kurang gas  
Tanggal : Jumat, 06 Desember 2019  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 13

# Industri Pupuk Kurang Gas

Kontrak gas mayoritas pabrik pupuk berakhir pada 2021-2022. Produksi gas cenderung turun, sementara permintaannya naik. Tanpa kepastian pasokan gas, industri pupuk terancam.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku industri pupuk dalam negeri diliputi ketidakpastian soal pasokan gas bumi selama tiga tahun ke depan. Kontrak gas mayoritas pabrik berakhir pada 2021-2022 dan tidak ada kejelasan soal kesinambungan pasokan gas setelah 2023.

Problem itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dan dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Fanshurullah Asa, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat.

Dalam paparannya, Aas mengatakan, industri pupuk membutuhkan kecukupan pa-

sokan gas dalam jangka panjang. Gas berkontribusi 70 persen terhadap biaya produksi pupuk. "Akan banyak pabrik tutup jika tidak ada kepastian pasokan (gas)," ujarnya.

Pupuk Indonesia membahayakan PT Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang Cikampek, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kebutuhan gas Pupuk Kujang pada tahun ini, misalnya, mencapai 101 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Namun, pasokan gas hanya 91 MMSCFD.

## Alokasi

Terkait hal itu, Komisi VII DPR mendesak pemerintah menjamin pasokan gas untuk industri pupuk. Kementerian ESDM juga diminta mengkaji kemungkinan penetapan alokasi gas (*domestic market obligation*/DMO) dan harga gas untuk industri pupuk di Indonesia. Rencana gasifikasi batubara sebagai alternatif juga diharapkan terwujud.

Soal DMO gas, menurut Djoko, kesepakatannya sudah teruang dalam kontrak bagi hasil antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas dengan SKK Migas. Beberapa tahun terakhir, alokasi gas di dalam negeri lebih besar ketimbang ekspor. Sampai triwulan III-2019, gas yang diekspor hanya 33 persen dari total produksi.

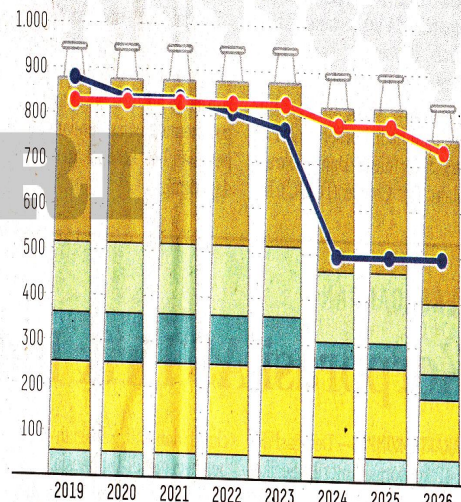
"Solusi jangka pendek adalah membeli gas dari pasar tunai (*pasar spot*). Gasifikasi batubara selain membutuhkan investasi besar, harga jualnya bisa mencapai 12 dollar AS per juta british thermal unit (MMBTU). Padahal, harga rata-rata gas untuk industri pupuk saat ini 5,8 dollar AS per MMBTU," tutur Djoko.

Soal kemungkinan produksi gas dalam negeri tidak diekspor, Dwi Soetjipto mengatakan, hal itu tergantung kesiapan infrastruktur gas di Indonesia. Infrastruktur yang dimaksud adalah fasilitas regasifikasi dan jaringan distribusi gas. (APO)

## Profil Pasokan dan Konsumsi Gas Pupuk Indonesia

(juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD))

PT Pupuk Kalimantan Timur  
PT Petrokimia Gresik  
PT Pupuk Kujang  
PT Pusri Palembang  
PT Pupuk Iskandar Muda  
Total Kebutuhan  
Total Pasokan



Sumber: Kementerian ESDM

INFOGRAFIK: ARIE